



# Ada Dokumen Catatan Khusus Haryadi

## ■ Hasil Penggeledahan KPK di Balaikota

**Ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya berbagai dokumen dengan catatan khusus dari HS selaku Wali Kota untuk penerbitan izin IMB.**

**YOGYA, TRIBUN** - Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pengusutan kasus dugaan suap terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan apartemen di Yogyakarta.  
Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan menyusul penangkapan dalam operasi tangkap tangan pekan lalu.  
Selain itu, KPK menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi

merangkap ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono (TBV), sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan pemberi suap, KPK menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk. Oon Nusthono sebagai tersangka.

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kantor eks wali kota dan dua kantor lainnya di Kompleks Balai Kota, Selasa (7/6). Penggeledahan dilakukan sampai malam hari.

• ke halaman 11

## Ada Dokumen

• Sambungan Hal 1

Hasilnya, penyidik KPK menyita dokumen berisi catatan khusus mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti terkait penerbitan IM tersebut.

"Pada penggeledahan dimaksud ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya berbagai dokumen dengan catatan khusus dari HS (Haryadi Suyuti) selaku Wali Kota untuk penerbitan izin IMB yang diduga kuat berkaitan dengan perkara ini," ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (8/6).

Adapun ketiga lokasi yang turut digeledah yaitu Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Bukti yang telah diamankan tersebut kemudian akan dianalisis tim penyidik KPK untuk disita sebagai pelengkap berkas perkara para tersangka.

"Tim penyidik segera menganalisa dan melakukan penyitaan untuk

bukti-bukti tersebut guna melengkapi berkas perkara para tersangka," tutur Ali.

Ali tidak menyebutkan apakah terdapat tersangka lain dalam proses pengusutan yang sedang berlangsung saat ini. Termasuk hasil pengusutan terhadap IMB-IMB sebelumnya.

### Dilapori

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi angkat bicara soal operasi penggeledahan KPK di sejumlah ruangan Balai Kota Yogyakarta, Selasa (7/6) malam.

Menurut Sumadi, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait perizinan hotel dan bangunan yang diterbitkan selama kepemimpinan Wali Kota Haryadi Suyuti. Kendati demikian, Sumadi mengaku belum mengecek langsung.

Informasi penggeledahan itu dia peroleh dari jawatannya di Pemkot Yogyakarta semalam.

"Saya dilapori oleh teman-teman, ada berkas-berkas yang diambil oleh rekan-rekan KPK. Paling banyak diangkat dari kantor Dinas PTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," kata Sumadi saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yog-

yakarta, Rabu (8/6).

Operasi penggeledahan, lanjut Sumadi, diduga kuat sebagai tindak lanjut dari penanganan kasus dugaan suap pemberian IMB apartemen yang menjerat eks Wali Kota Yogyakarta itu.

"Saya belum tahu detailnya (jenis berkas), tapi yang berkaitan dengan proses-proses di apartemen dan beberapa perizinan, pokoknya ada beberapa berkas yang mungkin itu rangkaian," katanya.

"Mungkin juga termasuk perizinan-perizinan (hotel dan apartemen) yang diterbitkan sebelum kejadian (OTT) kemarin, tapi masih di bawah kewenangan beliau (Haryadi)," sambungnya.

Penggeledahan itu sendiri berlangsung sejak siang hingga malam hari. Menurut Sumadi, kini segel KPK di beberapa ruangan yang digeledah telah dilepas.

Di antaranya ruang kerja wali kota, ruangan di kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Yogyakarta, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawan Permukiman (DPUKP) Kota Yogyakarta.

### Konstruksi kasus

Seperti diwartakan, dalam konstruksi perkara

disebutkan, diduga suap terkait pengurusan IMB pembangunan apartemen sebagai tindak lanjut dari penanganan kasus dugaan suap pemberian IMB apartemen yang menjerat eks Wali Kota Yogyakarta.

Haryadi diduga menerima uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp50 juta dari Oon dalam setiap pengurusan izin yang diajukan sejak 2019 tersebut.

IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan akhirnya terbit dan pada Kamis, 2 Juni 2022.

Pada hari yang sama, Oon juga memberikan uang kepada Haryadi. Namun, KPK langsung menangkap mereka usai transaksi itu.

Saat OTT, uang yang ditemukan berjumlah 27.258 ribu dolar AS. Uang itu dikemas dalam goodie bag.

Sebagai pemberi, Oon dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara selaku penerima, Haryadi, Nurwidhihartana dan Triyanto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Tribun Network/hda/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005